



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 230 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENJAGA KANTOR
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu mengangkat Tenaga Penjaga Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa saudara ABDUL KADIR NUPU, S.Pi tidak lagi melaksanakan tugas sebagai Penjaga Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga perlu diberhentikan;
 - c. bahwa saudara MINI YULIANY HULINGGI dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Penjaga Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019 memberhentikan Tenaga Penjaga Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama ABDUL KADIR NUPU, S.Pi.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019 mengangkat Tenaga Penjaga Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama MINI YULIANY HULINGGI

- KETIGA : Tenaga Penjaga Kantor sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Penjaga Kantor sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 15 Juli

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, I


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABID PENGADAAN DAN MUTASI	
2.	SEKRETARIS DKPP	
3.	KEPALA BKPP	
4.	KABAG HUKUM DAN HAM	
5.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	